

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

**ROSITA**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**R O S I T A**  
**A31107011**



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

disusun dan diajukan oleh

**R O S I T A**

**A31107011**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ratna A. Damayanti, SE., M.Soc. SC, Ak.  
NIP : 19670319199203 2 003

Dra. Hj Kartini, M.Si, Ak.  
NIP : 19650305199203 2 001

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abd. Hamid, S.E., M.Si, Ak.  
NIP : 196305151992031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R O S I T A  
NIM : A31107011  
Jurusan/Program Studi : AKUNTANSI/S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 Mei 2013  
Yang membuat pernyataan,

**R o s i t a**

## PRAKATA

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamualaikum Wr Wb*

Segala Puji bagi Allah *Azza wa jalla* yang telah memberikan karunia kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita semua, terutama keimanan, keislaman dan kekuatan khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tiada pernah terputus hingga akhir zaman kepada pemimpin sejati, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan tanggung jawab kepada seluruh alam.

Skripsi ini menunjukkan pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan dalam hal ini daya serap APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2010, dimana Buton Utara merupakan daerah pemekaran baru yang memiliki potensi sumber daya alam di segala aspek kehidupan, serta merupakan penelitian pertama tentang hubungan pengendalian internal dan kinerja keuangan dengan daya serap sebagai dasar penelitian. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu DR.Ratna Ayu Damayanti, SE, M.Soc, Sc, Ak dan Ibu Dra. Hj. Kartini, M.Si, Ak sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah

diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur serta diskusi yang dilakukan oleh peneliti

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tuaku tercinta H.Tasir S.E, M.si dan Hj.Fitri S.Sos yang sampai saat ini senantiasa mencurahkan kasih sayangnya yang tiada batas dan tidak pernah bosan memberikan dukungan moril dan materil serta tak pernah bosan mendoakan selalu di setiap doa dan disetiap sujud panjangnya. Kepada adikku satu-satunya Muhammad Taufik Tasir yang selalu memberikan motivasi.

dr. Mujtahid, suami terkasih, yang selalu memberikan semangat dan kekuatan disaat suka dan duka. *there is no words can describe how blessed I'm to have you in my life. Thank u so much for everything. SOQ.*

Seluruh Staf akademik jurusan akuntansi, terkhusus kepada pak Anto yang walaupun tidak di jurusan tapi tetap memberikan masukan-masukan yang membangun. Bupati Buton Utara Bapak Drs.H. Muh Ridwan Zakariah, M.Si beserta seluruh jajarannya, terima kasih telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.

Seluruh teman-teman yang banyak memberikan saran, bantuan dan motivasi, terkhusus Eka Pratiwi EL, Sinar Embong Bulan, Ummi Syathir Ramy, sahabatku nining, echeng, keluarga 07 , ua, indo', cia, rini, esse, fite, k'upi, rani, uli, dani, noneng, rahma, k'afni, bunga, resti, mita, mega, iren, iya yaumil, tenri, tia, vyo, kk 06 k'desi, k'widy, ika 08, serta teman-teman yang lain yang tak bisa penulis sebut satu persatu, semoga sukses semuanya.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepenuhnya menjadi

tanggung jawab peneliti dan bukan pada pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Januari 2013

R o s i t a



## ABSTRAK

### PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

#### *THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL TO FINANCIAL PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENT OF NORTH BUTON DISTRICT FISCAL YEAR 2010*

Rosita  
Ratna Ayu Damayanti  
Hj. Kartini

Di lingkungan pemerintah, salah satu permasalahan kinerja yang menjadi isu nasional adalah masalah penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil dan yang pada akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan dalam hal ini daya serap APBD. Unsur-unsur pengendalian internal berperan sebagai variabel independen, dan kinerja anggaran sebagai variabel dependen. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) serta tinjauan literatur dan website yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor-faktor pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan baik secara simultan ataupun parsial terhadap kinerja keuangan.

**Kata kunci :** Pengendalian internal, kinerja anggaran, daya serap.

*In government circles, one of the performance issues that became a national issue is a matter of budget absorption is relatively low and slow by national and local governments. This will hamper economic growth, especially in the real sector and which in turn will hamper the government's efforts to improve employment opportunities and reduce the level of poverty. This study aimed to analyze the influence of the internal control system to the government's financial performance, in this case budget absorption. The elements of internal control act as the independent variable, and the budget performance as the dependent variable. The data were obtained from questionnaires (primary) and a review of relevant literature and website The study showed that the variable factors of internal control consists of environment control, risk assessment, activities control, information and communication, as well monitoring control has a significant positive effect either simultaneously or partially on financial performance.*

**Keywords:** internal control, budget performance, absorption.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Praktis .....	4
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengendalian Internal .....	6
2.1.1 Definisi Pengendalian Internal .....	6
2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal.....	8
2.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian .....	8
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). .....	10
2.1.4.1 Pengertian SPIP .....	10
2.1.4.2 Unsur-unsur SPIP .....	11
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan.....	17
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	19
2.3.1 Pengertian Anggaran .....	19
2.3.2 Fungsi APBD .....	22
2.3.3 Struktur APBD .....	23
2.4 Kerangka Pikir.....	25
2.5 Rumusan Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29

3.2 Populasi dan Sampel .....	29
3.2.1 Populasi .....	29
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1 Skala Pengukuran .....	33
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	33
3.5.2.1 Uji Validitas .....	34
3.5.2.2 Uji Reliabilitas .....	34
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	34
3.5.3.2 Uji Multikolonieritas .....	35
3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	35
3.5.4 Uji Hipotesis.....	35
3.5.4.1 Uji Simultan (Uji $F$ ) .....	36
3.5.4.2 Uji Parsial (Uji $t$ ) .....	37
 BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI .....	 38
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Buton Utara .....	38
4.1.1 Kondisi Geografis .....	39
4.1.2 Topografi Wilayah .....	40
4.1.3 Kependudukan .....	42
4.1.4 Sektor Ekonomi .....	43
4.1.5 Struktur Pemerintahan.....	43
4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.....	45
4.2.1 Bupati / Kepala Daerah .....	45
4.2.2 Wakil Bupati / Wakil Kepala Daerah .....	46
4.2.3 Sekretaris Daerah .....	46
4.2.4 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat..	47
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 51
5.1 Pengumpulan Data .....	51
5.2 Uji Kualitas Data.....	52
5.2.1 Uji Validitas Data .....	52
5.2.2 Uji Reabilitas Data.....	52
5.3 Uji Asumsi Klasik.....	54
5.3.1 Uji Normalitas .....	54
5.3.2 Uji Multikolinearitas .....	56
5.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	57
5.4 Analisis Regresi Berganda .....	58
5.5 Uji Hipotesis .....	61
5.5.1 Uji Simultan (Uji $F$ ) .....	61
5.5.2 Uji Parsial (Uji $t$ ).....	62

BAB VI PENUTUP .....	66
6.1 Kesimpulan .....	66
6.2 Saran-saran .....	67
6.3 Keterbatasan.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
5.1	Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuisisioner .....	51
5.2	Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian .....	53
5.3	Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian .....	53
5.4	<i>Variance Inflation Factor</i> .....	56
5.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59
5.6	Hasil Uji Simultan .....	62
5.7	Hasil Uji Parsial .....	63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Halaman
5.1	Uji Normalitas ( <i>p</i> -plot)S .....	54
5.2	Grafik Histogram .....	55
5.3	Uji Heterokedastisitas.....	58

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran		Halaman
1	Biodata .....	72
2	Kuesioner .....	74
3	Surat Selesai Melakukan Penelitian .....	86
4	Master Tabel .....	87
5	Peta Administrasi Kabupaten Buton Utara.....	90

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama satu dekade terakhir, peran sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah mendapat perhatian luas dari para auditor internal, auditor eksternal, penyusun laporan keuangan, asosiasi profesi, dan badan-badan legislatif serta para birokrat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pemerintahan (Abdullah, 2008).

Di lingkungan pemerintah, salah satu permasalahan yang menjadi isu nasional adalah masalah penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil dan yang pada akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat kemiskinan (Abdullah, 2008).

Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi pemerintah dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya yang tentu saja akan berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut, serta efektivitas hasilnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal diperlukan untuk meyakinkan bahwa sebagian besar ketidakpastian, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan telah diperhitungkan pengaruhnya pada pencapaian hasil akhir kegiatan. Sistem ini diharapkan dapat memberi keyakinan terhadap penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien



dan efektif, meningkatkan daya serap anggaran, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasmah, 2010).

Keberhasilan mengenali dan mengukur besaran ketidakpastian, baik yang melekat pada instansi pemerintah sampai kepada suatu kegiatan, akan memungkinkan instansi pemerintah untuk memilih berbagai aktivitas pengendalian dalam rangka pengelolaan kegiatan dan resiko, serta pemilihan metode pengelolaan yang tepat yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses sehingga sumber daya yang telah dianggarkan dapat diserap dengan tepat waktu dan tepat guna (Abdullah, 2008).

Berubahnya sistem pengelolaan keuangan negara tidak hanya dalam hal penerapan penganggaran, namun juga dalam sistem pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain di bidang penganggaran keuangan negara, *line based budgeting* diganti oleh *performance based budgeting* yaitu penganggaran yang didasarkan pada kinerja dan berorientasi pada hasil akhir. Di bidang pertanggungjawaban, pencatatan dan pelaporan, keuangan negara tidak lagi dicatat secara *single-entry* namun diubah berdasarkan kaidah standar akuntansi keuangan yang menerapkan pencatatan secara *double-entry* dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap yaitu neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Abdullah, 2008)

Sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan memerlukan dukungan sistem pengelolaan keuangan instansi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari pembentukan struktur organisasi yang

memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, penetapan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, pelaksanaan praktek-praktek sehat dalam melakukan tugas, serta pemberian tanggungjawab sesuai dengan tingkat kecakapan pegawai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui keterkaitan antara proses pengendalian internal terhadap daya serap anggaran, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni, Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan dalam hal ini daya serap APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2010?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan dalam hal ini daya serap APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2010.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya di bidang akuntansi.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa.
3. Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi pihak lain mengenai sistem pengendalian internal dan penyusunan anggaran untuk sektor publik

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tentang definisi, tujuan/fungsi, dan unsur-unsur pengendalian internal, pengertian kinerja keuangan dan APBD.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

#### **BAB IV Tinjauan Umum Objek Penelitian**

Bab ini menguraikan profil singkat objek penelitian yakni Sejarah Pemerintah Kabupaten Buton Utara beserta instansi dalam Pemerintah Kabupaten Buton Utara tersebut.

#### **BAB V Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai karakteristik responden, hasil uji validitas dan realibilitas data, analisis statistik deskriptif variabel penelitian, analisis kuantitatif berupa uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis.

#### **BAB VI : Penutup**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan hasil penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengendalian Internal

##### 2.1.1 Definisi pengendalian internal

Sistem pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Istilah pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah "*Internal Control*", meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan internal. Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting yang dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah :

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Dengan pengertian tersebut, secara umum sistem pengendalian intern diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain. yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penciptaan pengendalian internal. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran karakter pengendalian yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi sebagai upaya manajemen organisasi mengantisipasi ketidakpastian dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karakter pengendalian internal bergeser dari *hard control* menuju *soft control*. Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi

dan efektivitas tidak hanya melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika dan penyatuan pandangan atas visi, misi dan strategi organisasi.

Dikemukakan pula oleh Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) adalah:

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (James, 1997: 155).

Kemudian Hartanto (1997:51) memberikan penjelasan tentang pengendalian internal dengan membedakan ke dalam arti sempit dan arti luas.

Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan "*Internal Check*" yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan horizontal dengan penjumlahan vertikal; Dalam arti luas, pengendalian intern dapat disamakan dengan "*Management Control*", yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/ mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian internal meliputi : struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), anggaran dan standar pemeriksaan internal dan sebagainya. (Hartanto, 1997: 51).

Sedangkan Baridwan (1998: 97) mengartikan pengendalian internal sebagai berikut :

Pengendalian internal meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digaris bawahi.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut:

Sistem pengendalian internal meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Pengendalian internal dalam arti luas seringkali disamakan dengan *management control*. Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat pada sistem pengendalian internal dikelompokkan menjadi dua sub sistem, yaitu sub sistem pengendalian administrasi (*administrative control*) dan pengendalian akuntansi (*accounting control*). Jadi dalam arti yang luas, sistem pengendalian internal mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian internal yang bersifat *accounting* dan administrasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998: 23).

Dari keempat definisi yang diungkapkan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal merupakan suatu “sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.

### **2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan AICPA tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari pengendalian internal yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, dan membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi (Zaki, 1999: 14).

### **2.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal**

Dalam buku Akuntansi Keuangan (Zaki, 1999: 15) dikatakan bahwa penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan

tertentu harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Suatu sistem pengendalian internal yang baik haruslah bersifat cepat, murah dan aman, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar, terjamin keamanannya dan biaya pengawasan yang dibutuhkan relatif tidak mahal.

Prinsip-prinsip umum sistem pengendalian internal hanya berlaku sebagai pedoman, bukan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan secara baku. Meskipun demikian, AICPA mengemukakan bahwa suatu sistem pengendalian internal yang memuaskan akan bergantung pada sekurang-kurangnya empat unsur pengendalian internal, yaitu:

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tepat
2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya
3. Praktek-praktek yang sehat haruslah dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawab.

Unsur-unsur tersebut di atas adalah sangat penting dan harus diterapkan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan, agar tercipta sistem pengendalian internal yang baik, sebab kelemahan yang serius pada salah satu di antaranya, pada umumnya akan merintangi sistem itu bekerja dengan lancar dan sukses.



## 2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

### 2.1.4.1 Pengertian SPIP

Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan pengertian tersebut, secara umum sistem pengendalian intern diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penciptaan pengendalian internal. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran karakter pengendalian yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi sebagai upaya manajemen organisasi mengantisipasi ketidakpastian dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karakter pengendalian internal bergeser dari *hard control* menuju *soft control*. Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas tidak hanya melalui prosedur dan mekanisme pengendalian, tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika dan penyatuan pandangan atas visi, misi dan strategi organisasi. Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) memiliki lima buah unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal (Widayadi, 2008).

#### **2.1.4.2 Unsur-unsur SPIP**

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 (hal 4, pasal 3), SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian resiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan pengendalian internal.

Kelima unsur pengendalian internal tersebut merupakan suatu unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari lingkungan pengendalian adalah SDM di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

##### **2.1.4.2.1 Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif, mendukung pengendalian internal, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan juga harus menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawai serta menggunakan kebijakan dan

praktik yang baik atas pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan juga harus memiliki kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian internal yang efektif. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap efektifitas pengendalian internal. Serta harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal. (Soeseno, 2009:11)

Fondasi dari sistem pengendalian adalah orang-orang di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penerapan lingkungan pengendalian yang baik dalam rangka peningkatan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai serta menjadi komitmen bersama dalam melaksanakannya, sangatlah penting untuk terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya (Widayadi, 2008).

Lingkungan pengendalian dibentuk oleh perilaku dari orang-orang di dalam organisasi yang mendukung pengendalian internal dan memengaruhi kesadaran mereka akan pentingnya pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dihasilkan dari tata kelola (*governance*) yang dilakukan manajemen, yang terdiri dari: filosofi, gaya dan perilaku yang mendukung, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral keseluruhan orang di dalam organisasi. Lingkungan pengendalian selanjutnya dipengaruhi oleh hubungan-hubungan dari struktur dan akuntabilitasnya di organisasi (Widayadi, 2008).

Lingkungan pengendalian berpengaruh kuat terhadap keputusan dan kegiatan di dalam organisasi, dan menjadi fondasi bagi seluruh unsur lain dari sistem pengendalian internal. Jika fondasi ini tidak kuat, atau lingkungan pengendaliannya tidak positif, maka seluruh sistem pengendalian internal tidak

akan berjalan efektif seperti yang diharapkan. Lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh kuat terhadap cara-cara aktivitas organisasi distrukturkan, penetapan tujuan dan sasaran dan penaksiran/penilaian resiko. Lingkungan pengendalian memengaruhi aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengaruh tersebut tidak hanya pada desainnya, tetapi juga terhadap cara mereka bekerja dari hari ke hari. Lingkungan pengendalian itu juga memengaruhi kesadaran dari orang-orang yang menjadi anggota organisasi akan pengendalian (Widayadi, 2008).

Aktivitas pengendalian yang efektif berupaya kuat untuk memiliki orang-orang yang kompeten, yang mempunyai integritas terhadap keseluruhan organisasi dan kesadaran akan pengendalian, serta membangun suatu "irama tinggi" yang positif. Mereka menetapkan kebijakan dan prosedur-prosedur, seringkali termasuk kode etik tertulis, yang mendorong nilai-nilai bersama dan tim kerja dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

#### **2.1.4.2.2 Penilaian Resiko**

Unsur kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi identifikasi dan kegiatan analisis resiko. Selain dipengaruhi risiko, keberhasilan pencapaian tujuan instansi pemerintah dipengaruhi pula oleh kecermatan dalam proses penetapan tujuan. Oleh karena itu, dalam unsur kedua ini, diuraikan pula ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses penetapan tujuan instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

Pertama-tama, pimpinan harus menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten baik untuk tingkatan instansi maupun untuk tingkatan pendukungnya. Setelah itu, dilakukan identifikasi resiko secara menyeluruh, baik resiko dari sumber internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Setelah resiko-resiko teridentifikasi, instansi pemerintah perlu melakukan analisis resiko dan mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola resiko-resiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian resiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya (Widayadi, 2008).

#### **2.1.4.2.3 Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain suatu organisasi memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai (Soeseno, 2009:12).

Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan dapat diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kegiatan pengendalian harus dikembangkan pada kegiatan pokok instansi pemerintah dan didasarkan pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur

dikembangkan untuk meminimalkan risiko sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah dapat dicapai. Instansi pemerintah dapat menerapkan kategori kegiatan pengendalian yang relevan dan dipandang tepat untuk meminimalkan risiko. Bukan merupakan keharusan bahwa keseluruhan kategori (sub unsur) kegiatan pengendalian harus diterapkan untuk satu risiko tertentu. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan (diskresi) untuk menentukan kegiatan pengendalian yang tepat (Widayadi, 2008).

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat penilaian risiko.
- b. Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya (Widayadi, 2008).

Kegiatan pengendalian yang teridentifikasi tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- a. Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai
- b. Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut
- c. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan
- d. Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi yang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu (Widayadi, 2008).

#### **2.1.4.2.4 Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi penting bagi pengendalian yang efektif, informasi tentang rencana organisasi, lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah dan seluruh organisasi. Keandalan dan relevansi informasi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar harus diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk dan jangka waktu tertentu sehingga bermanfaat. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi yang berhubungan dengan operasi, keuangan, dan ketaatan sehingga memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi (Widayadi, 2008).

Sistem informasi dan komunikasi dapat bersifat formal maupun informal. Sistem informasi dan komunikasi formal yang dapat berupa dari teknologi informasi yang canggih sampai dengan pertemuan staf yang sederhana harus dapat menyediakan data masukan dan umpan balik yang berhubungan dengan tujuan operasi, laporan keuangan dan ketaatan. Sistem tersebut vital bagi keberhasilan organisasi. Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang dalam organisasi untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memperoleh informasi untuk diolah dan disampaikan kepada pimpinan instansi dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan serta disajikan kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan tepat waktu, sehingga memungkinkan bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasionalnya (Widayadi, 2008).

#### **2.1.4.2.5 Pemantauan Pengendalian Internal**

Pemantauan pengendalian internal adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu. Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan (Soeseno, 2009:14).

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, dan reviu lainnya. Pemantauan pengendalian intern berkelanjutan berada pada setiap orang dalam instansi pemerintah sesuai dengan lingkup kerjanya. Kedudukan seseorang dalam organisasi membantunya menentukan fokus dan sejauh mana tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pegawai/staf, penyelia, pimpinan menengah dan pimpinan tinggi tidak akan sama fokusnya (Widayadi, 2008).

## **2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana



menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien” (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. “Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*” (Mardiasmo, 2002: 4).

Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) “yaitu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudin (2006 : 25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Disamping itu, menurut Sedarmayanti (2003 : 64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau

suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan”.

Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability (knowledge + skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

## **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran**

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato Presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBD, misalnya, selalu menjadi indikator perekonomian Negara untuk selama setahun berikutnya. Bahkan, tidak jarang APBD tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi. Jika demikian, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan anggaran? Bagaimana seluk-beluknya?

Menurut Mardiasmo (2002), "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)". Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah dituntut peran penting anggaran. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politik yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil.

Mardismo (2002:61) menyatakan bahwa "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran".

Sedangkan menurut Bastian (2006:164) "mengutip dari *National Committeem on Govermental Accountng* (NCGA), yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu." Anggaran merupakan dokumen yang berisi angka-angka yang diprediksikan akan diperoleh dan akan digunakan untuk satu jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu instrumen yang menggambarkan kebijakan manajemen yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dibuat

secara sistematis dan terencana dengan mengintegrasikan dan mengalokasikan seluruh sumber daya (*resources*) ke dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada suatu masa tertentu.

Sedangkan Anggaran menurut Suparmoko (2002) merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, dan juga merupakan alat kontrol atau pengawasan baik terhadap pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, pertanggungjawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan di mana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemda menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran sektor publik menggambarkan kegiatan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder. Oleh sebab itu setiap anggaran publik harus

berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan implementor serta meningkatkan wibawa pemerintah.

Anggaran menjadi sangat esensial dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum.

Menurut Yuwono (2002: 85) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **2.3.2 Fungsi APBD**

Mardiasmo (2002:63) mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik, yaitu :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
- d. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination & Communication*)
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
- g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
- h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*).

Menurut Permendagri No.13/2006 pasal 16, APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepanutan
6. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **2.3.3 Struktur APBD**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.3.1 Pendapatan daerah**

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

### **2.3.3.2 Belanja daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

### **2.3.3.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah, meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi: pembentukan dan cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

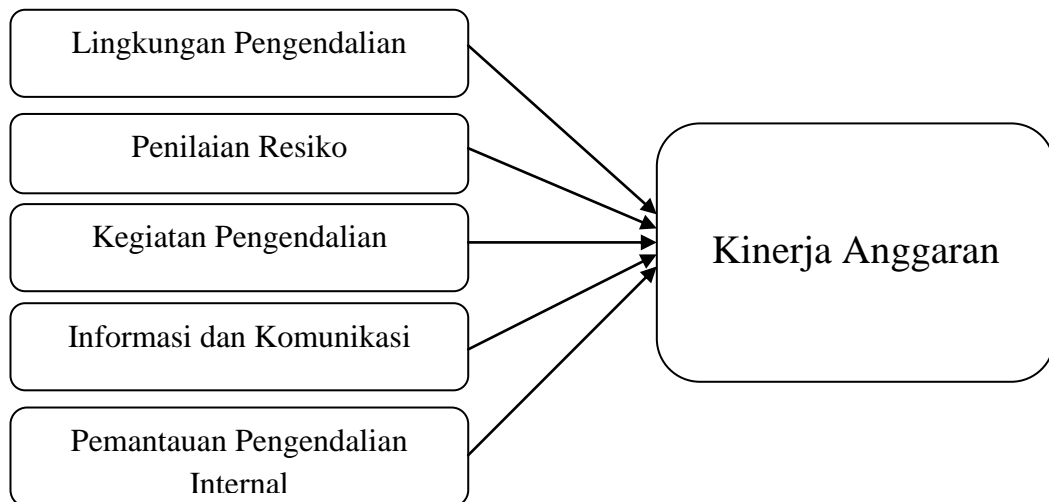
## **2.4 Kerangka Pikir**

Selayaknya dalam setiap program pemerintah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian disertai dengan proses pengendalian internal sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Evaluasi program kerja pemerintah, dalam hal ini penilaian akan kinerja keuangan dalam hal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat tercermin dari tingkat daya serap anggaran kegiatan tersebut.

Daya serap anggaran itu sendiri, dapat dipengaruhi secara baik secara langsung ataupun tidak langsung dari pelaksanaan proses pengendalian internal. Berdasarkan telaah teoritis di atas, maka model penelitian atau kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan



pengendalian intern terhadap daya serap APBD digambarkan dalam skema berikut :



Skema 1. Kerangka Pikir

## 2.5 Rumusan Hipotesis

### a. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kinerja keuangan

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan pengendalian meliputi semua aspek pengendalian mulai dari penegakan nilai integritas dan etis, komitmen terhadap kompetensi, pembinaan sumber daya manusia, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab hingga hubungan yang baik dengan instansi terkait.

Lingkungan pengendalian berpengaruh kuat terhadap keputusan dan kegiatan di dalam organisasi, dan menjadi fondasi bagi seluruh unsur lain dari sistem pengendalian internal sehingga mempengaruhi tidak hanya pada aktivitas

pengendalian, namun juga mempengaruhi kesadaran dan cara kerja setiap elemen instansi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dari instansi tersebut.

### **H1: Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan**

#### **b. Pengaruh penilaian resiko terhadap kinerja keuangan**

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Pelaksanaan proses ini akan menciptakan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan dan cara kerja instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

### **H2: Penilaian resiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan**

#### **c. Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kinerja keuangan**

Kegiatan pengendalian meliputi semua kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kebijakan dan prosedur ini, maka memberikan keyakinan pada pimpinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **H3: Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan**

#### **d. Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kinerja keuangan**

Kehandalan dan relevansi informasi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar harus diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dikomunikasikan

kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk dan jangka waktu tertentu sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan instansi. Informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan serta disajikan kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan tepat waktu, sehingga memungkinkan bersangkutan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab operasionalnya dengan baik demi pencapaian tujuan instansi tersebut.

#### **H4: Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan**

e. Pengaruh pemantauan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan

Pemantauan pengendalian internal meliputi seluruh proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal. Dengan adanya prosedur pemantauan pengendalian internal, akan memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan segera dilakukan tindakan perbaikannya, sehingga dapat lebih mendorong proses pencapaian tujuan instansi terkait.

#### **H5: Pemantauan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ruang lingkup penelitian adalah pegawai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.

#### **3.2 Populasi dan sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 72). Sekaran (2006: 31) berpendapat bahwa populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh kepala bagian instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2004: 72). Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Hal ini dilakukan mengingat adanya kendala biaya, waktu, dan tenaga serta masalah heterogenitas dan homogenitas dari elemen populasi (Sekaran, 2006: 30).

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah seluruh kepala bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang hadir ketika penelitian dilaksanakan. Metode pemilihan sampel adalah metode total sampling.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud memperoleh data yang akurat dan *valid*. Menurut Sekaran (2006: 21), kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner yang diberikan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup (*closed question*), yaitu kuesioner yang meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti.

Adapun isi kuesioner sebagai instrumen penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas :

- a. Identitas responden meliputi: nama responden, dan asal bagian.
- b. Daftar kuesioner, meliputi pernyataan mengenai variabel independen penelitian. Variabel menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat variabel merupakan alat dan sarana untuk melakukan pengukuran.

Variabel penelitian terdiri atas variabel dependen berupa Kinerja Keuangan dan variabel independen yaitu proses pelaksanaan pengendalian

internal. Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh/memungkinkan dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan, variabel independen adalah variabel yang mungkin akan mempengaruhi variabel dependennya.

## 2. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. *Library research* merupakan dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non-publikasi dari sumber sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006: 21).

## 3. Mengakses *Website* dan Situs-Situs

Metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

### 3.4 Jenis dan sumber data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui pihak perantara. Data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang

tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

### 3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Menurut Sugiyanto (2004) analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti memilih analisis linear berganda, karena penelitian kali ini menggunakan lebih dari satu variable independen.

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan :

- Y : Daya serap anggaran
- X<sub>1</sub> : Lingkungan pengendalian
- X<sub>2</sub> : Penilaian resiko
- X<sub>3</sub> : Kegiatan pengendalian
- X<sub>4</sub> : Informasi dan komunikasi
- X<sub>5</sub> : Pemantauan pengendalian internal
- β<sub>0</sub> : Konstanta
- β<sub>1-5</sub> : Koefisien regresi
- e : *Error*

### 3.5.1 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran persepsi pegawai pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. Persepsi pegawai diukur melalui pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner dan menggunakan *likert scale* dengan skala 1 sampai 5. Dengan menggunakan kuesioner maka pegawai harus mengisi jawaban yang dianggap paling tepat dengan skala *likert* berdimensi 5 skala sebagai berikut :

Sangat setuju (5)	setuju (4)	netral (3)	Tidak setuju (2)	Sangat tidak setuju (1)
----------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------------

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2004: 51).

### 3.5.2 Uji kualitas data

Data memiliki kedudukan yang sangat penting, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu, benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Selain itu, kuesioner sebagai instrumen penelitian harus memenuhi persyaratan *valid* dan *reliable*.



### 3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelasi item-total dikoreksi (*corrected item-total correlation*).

### 3.5.2.2 Uji Reabilitas

Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik Normal P-P *Plot of Regression*

*Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambil keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, serta (2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.5.3.2 Uji Multikolonieritas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

### **3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan *Scatterplot Model*. Analisis pada gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier tidak terdapat heteroskedastisitas.

### **3.5.4 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern

terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan pengujian secara simultan dengan uji  $F$  dan secara parsial dengan uji  $t$ .

#### 3.5.4.1 Uji Simultan (Uji $F$ )

Uji  $F$  digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji  $F$  adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta = 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.
- $H_a : \beta \neq 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.

Pada tabel ANOVA didapat uji  $F$  yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5%, serta derajat kebebasan  $df_1$  dan  $df_2$  untuk mencari nilai  $F$  tabel. Nilai  $F$  tabel dapat dilihat dengan menggunakan  $F$  tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- b. Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

### 3.5.4.2 Uji Parsial (Uji $t$ )

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji  $t$ , yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan uji  $t$  adalah sebagai berikut :

- $H_0: \beta = 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.
- $H_a: \beta \neq 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.

Untuk mencari  $t$  tabel dengan  $df = N-2$ , taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai  $t$  tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
- b. Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Buton Utara**

Kabupaten Buton Utara/ Kulisusu/ Kolencusu/ Kalingsusu merupakan salah satu dari empat benteng pertahanan Barata Patapalena (cadik penjaga keseimbangan perahu negara) di masa Kesultanan Buton. Barata Kulisusu bersama-sama dengan Barata Muna, Barata Tiworo dan Barata Kaledupa merupakan pintu-pintu pertama pertahanan sebelum musuh masuk ke dalam wilayah pusat kekuasaan di Baubau. Oleh karena itu mereka memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keselamatan negara. Mereka juga diberi hak otonom untuk mengatur sendiri daerahnya termasuk memiliki tentara sendiri namun dengan batasan-batasan pengaturan yang sudah digariskan oleh pemerintahan pusat yang ada di Baubau.

LIPU TINADEAKONO SARA, bahwa berdasarkan sejarah Buton Utara adalah negeri yang didirikan dan dibangun oleh SARA. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bonegunu, Kambowa, Wakorumba, Kulisusu, Kulisusu Barat dan Kecamatan Kulisusu Utara. Ibukota Kabupaten Buton Utara adalah Buranga. Buton Utara merupakan kawasan yang kaya sumberdaya alam. Buton Utara memiliki banyak potensi bahan tambang (aspal, minyak bumi, emas dan konon

uranium), hasil hutan (jati, damar dan rotan), hasil laut serta kawasan perkebunan yang subur.

Dari 6 (enam) kecamatan tersebut, selanjutnya terbagi menjadi 49 buah desa, 8 kelurahan dan 2 (dua) buah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembinaannya. Sejalan dengan terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Buton Utara, juga diiringi dengan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari laki-laki 18 orang dan perempuan 2 orang dari hasil pemilihan legislatif tahun 2004-2009. Jumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara sebanyak 3 (tiga) fraksi yaitu fraksi Golkar sebanyak 6 orang, fraksi Amanat Nasional 3 orang dan fraksi Kebersamaan berjumlah 11 orang. Kemudian selama tahun 2008 anggota DPRD Kabupaten Buton Utara menghasilkan produk hukum sebanyak 71 buah yang terdiri atas peraturan daerah sebanyak 8 buah, keputusan DPRD sebanyak 10 orang, kesimpulan rapat sebanyak 35 buah, keputusan pimpinan DPRD sebanyak 4 buah, keputusan panitia musyawarah sebanyak 7 buah. Memorandum sebanyak 2 buah dan keputusan panitia anggaran sebanyak 5 buah.

#### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Buton Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, yang wilayahnya meliputi sebagian pulau Buton bagian utara, serta pulau-pulau kecil yang tersebar disekitar kawasan tersebut. Kabupaten Buton Utara terletak di bagian selatan khatulistiwa pada garis lintang  $4^{\circ}06'$  sampai  $5^{\circ}15'$  lintang selatan dan dari barat ke timur  $122^{\circ}59'$  bujur timur dengan  $123^{\circ}15'$

bujur timur. Kabupaten Buton Utara yang memiliki luas wilayah 1.923,03 km<sup>2</sup> (belum termasuk wilayah perairan) memiliki batasan-batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan selat wawoni; sebelah timur berbatasan dengan laut banda; sebelah selatan dengan Kabupaten Buton; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton dan Kabupaten Muna.

Kabupaten Buton Utara secara administratif terdiri dari 6 kecamatan definitif yang selanjutnya terbagi atas 49 desa, 8 kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang masih dalam tahap pembinaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Utara. Kabupaten Buton Utara terdiri dari 2 matra darat dan matra laut untuk wilayah daratan memiliki luas 1.923,03 km<sup>2</sup> atau 192.303 hektar yang terletak di bagian utara pulau Buton dan luas perairan sekitar 2.500 km<sup>2</sup>. Dari 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Buton Utara, kecamatan Bonegunu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas dibanding kecamatan lainnya, yaitu seluas 491,44 km<sup>2</sup> atau 25,56 persen dari seluruh luas Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya disusul Kulisusu Barat seluas 370,47 km<sup>2</sup> atau 19,26 persen, kecamatan Kulisusu Utara seluas 339,64 km<sup>2</sup> atau 17,66 persen, kecamatan Kambowa seluas 303,64 km<sup>2</sup> atau 15,78 persen. Selanjutnya dua kecamatan lainnya memiliki wilayah yang lebih kecil masing-masing kecamatan Wakorumba seluas 245,26 km<sup>2</sup> atau 12,75 persen dan yang terakhir kecamatan Kulisusu seluas 172,78 km<sup>2</sup> atau 8,98 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara.

#### **4.1.2 Topografi Wilayah**

Topografi wilayah Kabupaten Buton Utara untuk wilayah yang ada di utara pulau buton terdiri dari barisan-barisan pegunungan yang sedikit melengkung ke

arah utara – selatan dengan ketinggian antara 300 – 800 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut, hampir setengah (92.799 ha) atau sebesar 48,26 persen luas wilayah Kabupaten Buton Utara berada pada ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut, disusul ketinggian 25–100 meter di atas permukaan laut 40.694 ha atau sebesar 21,16 persen sedangkan wilayah yang memiliki ketinggian 0 – 7 meter di atas permukaan laut adalah seluas 13.100 ha atau 6,81 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara.

Kemudian berdasarkan kemiringan, wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki kemiringan yang hampir merata pada setiap klasifikasi kemiringan, dimana kemiringan 0 – 2 persen 57.129 hektar (29,71 persen), kemudian disusul kemiringan 15 – 40 persen seluas 55.309 hektar atau 28,76 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya kemiringan di atas 40 persen seluas 50.875 hektar atau 26,46 persen serta kemiringan 2 – 15 persen seluas 28.990 hektar atau 15,08 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara.

Dari sudut geologis kondisi wilayah Kabupaten Buton Utara yang berada di pulau Buton bagian utara memiliki jenis tanah *mediteran*, *rensiana* dan *litosol* sedangkan pada wilayah Kabupaten Buton Utara bagian selatan memiliki tanah *podsolik merah kuning*. berdasarkan jenis batuan, seluas 94.457 hektar atau 49,12 persen wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki jenis batuan dengan kategori TMC, disusul TMS dan KTC dengan luas masing-masing 39.005 hektar (20,28 persen) dan 27.718 hektar atau 14,41 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buton Utara.



### 4.1.3 Kependudukan

Kondisi kesejahteraan suatu wilayah juga berkaitan dengan masalah kependudukan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin besar pula beban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan dan kebutuhan penduduk tersebut. Ada banyak persoalan kependudukan yang mengemuka akhir-akhir ini dimana pemerintah daerah harus cepat tanggap mengatasinya. Sebagai contoh, pemerintah daerah dalam koridor otonomi daerah diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduknya sehingga dapat mengurangi migrasi ke daerah lain. Tentu masih banyak faktor lain yang harus dibenahi sehingga penataan masalah kependudukan ini menjadi faktor penting dalam menggambarkan keberhasilan suatu pemerintah daerah, termasuk penduduk Kabupaten Buton Utara.

Penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 48.700 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 23.389 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 25.311 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 12.508 kepala keluarga. Penduduk Kabupaten Buton Utara tersebar di 6 (enam) kecamatan yakni kecamatan bonegunu sebesar 7.252 jiwa (14,89) persen, kecamatan kambowa 5.364 jiwa (11,01) persen, kecamatan wakorumba 6.096 jiwa (12,52) persen, kecamatan kulisusu 17.100 jiwa (35,11) persen. Kecamatan kulisusu barat 5.978 jiwa (12,28) persen dan kecamatan kulisusu utara sebesar 6.910 jiwa (14,19) persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 48.700 jiwa dengan luas wilayah sebesar 1.923,03 km<sup>2</sup> mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 25 jiwa/km<sup>2</sup>. kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Kulisusu sebesar 99 jiwa/km<sup>2</sup>, menyusul kecamatan Wakorumba sebesar 25 jiwa/km<sup>2</sup>, kecamatan Kulisusu Utara rata-rata 20 jiwa/km<sup>2</sup>, kecamatan Kambowa sebesar 18 jiwa/km<sup>2</sup>, kecamatan Kulisusu Barat 16 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang

paling jarang penduduknya adalah kecamatan Bonegunu sebesar 15 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Kulisusu didorong oleh laju pertumbuhan penduduk dimana saat ini sebagian besar aktifitas jasa pemerintahan dan perdagangan masih berpusat di kecamatan Kulisusu.

#### **4.1.4 Sektor Ekonomi**

Buton utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Dalam sektor pertanian luas tanah sawah adalah 1.962 hektar atau 1,02 persen dan yang sudah diusahakan seluas 400 hektar atau 0,21 persen, sedangkan yang tidak diusahakan seluas 1.562 hektar atau 0,81 persen. Besarnya lahan sawah yang belum diusahakan disebabkan sarana pengairan berupa irigasi belum tersedia dengan memadai, sehingga pengolahan sawah pada umumnya tergantung pada curah hujan. Produksi padi Kabupaten Buton Utara tahun 2008 berjumlah 2.011 ton yang terdiri dari padi sawah sebanyak 1.467 ton (72,95 persen) dari total produksi padi.

#### **4.1.5 Struktur Pemerintahan**

Dalam melaksanakan pemerintahan, Kabupaten Buton Utara yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta dibantu beberapa unit kerja, yaitu:

- Dalam bentuk sekretariat :
  1. Sekretariat Daerah
  2. Sekretariat DPRD
- Dalam bentuk dinas :
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  6. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  7. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
  8. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negara
  9. Dinas Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Kepegawaian dan Persandian
  10. Dinas PPKAD
  11. Dinas Pertanian
  12. Dinas Kehutanan
  13. Dinas Pertambangan
  14. Dinas Kelautan dan Perikanan
  15. Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
  16. Dinas Inspektorat
- Dalam Bentuk Kantor hanya satu yakni Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  - Dalam Bentuk Badan :
    1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Statistik dan Penanaman Modal
    2. Badan Lingkungan Hidup
    3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    4. Badan Kesbang Linmas
    5. Badan Ketahanan Pangan
    6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

## **4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara**

Sekretariat daerah Kabupaten Buton Utara memiliki mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 05 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. Sekretariat Daerah memiliki kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan pemerintah kabupaten;
2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah kabupaten, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4.2.1 Bupati atau Kepala Daerah**

Bupati atau Kepala Daerah, bertugas untuk :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD;
2. Mengajukan rencana Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.2 Wakil Bupati atau Wakil Kepala Daerah**

Wakil Bupati atau Wakil Kepala Daerah, bertugas untuk :

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan;
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah; dan
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil Kepala Daerah Provinsi.

#### **4.2.3 Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah, bertugas untuk :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;
3. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah daerah kabupaten; dan
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2.4 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,**

Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana.

1. Bagian Bina Pemerintahan, bertugas untuk :

Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan, desa, dan kelurahan serta pengembangan otonomi daerah, yang terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah, bertugas untuk :

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, penyiapan bahan pertanggung-jawaban bupati memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan serta peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Sub bagian tata pengembangan daerah dan hubungan antar lembaga.

c. Sub bagian prasarana fisik pemerintahan.

2. Bagian Organisasi dan Hukum, bertugas untuk :

Menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi, pegkajian peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan akuntabilitas kinerja.

a. Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyiapkan rancangan peraturan perundang

undangan melalui koordinasi, menelaah, dan merumuskan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta mengevaluasi pelaksanaannya.

- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pendokumentasian, penataan, pengadaan, dan pendistribusian peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan pemberian bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah.
- c. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparat daerah, serta menyiapkan bahan penataan organisasi, penataan sistem, metode dan prosedur kerja.
- d. Sub Bagian ANJAB, Kepegawaian dan Pengolahan Data, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemanfaatan analisis jabatan serta melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standard dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

Mengolah bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dalam hal pelayanan dan bantuan sosial.

- a. Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial, mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan kesejahteraan sosial, kepemudaan, keolahragaan, budaya dan seni.

- b. Sub Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka koordinasi dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
  - c. Sub Bagian Ormas dan Keagamaan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan, pembinaan mental dan spiritual dan urusan haji.
4. Bagian Administrasi Ekonomi Pembangunan, mempunyai tugas Mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
- a. Sub bagian Administrasi Pembangunan, Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan, pembinaan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan.
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.
  - c. Sub Bagian Usaha Daerah, Produksi Daerah dan Penanaman Modal, memiliki tugas mengumpulkan bahan, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan usaha daerah, Pembinaan produksi daerah serta menganalisa penanaman modal yang tepat bagi daerah.
5. Bagian Humas, terdiri dari :
- a. Sub Bagian protokoler, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk pemantapan kebijakan



- pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokoleran.
- b. Sub Bagian Penghubung, Sandi dan Telekomunikasi, mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi serta melakukan pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi.
6. Bagian Umum, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, pengelolaan perlengkapan rumah tangga serta keuangan.
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai Tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah.
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah daerah.

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan seluruh Kepala Bagian dan Sub-bagian Pemerintah Daerah Buton Utara. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung kantor Pemerintah Daerah Buton Utara yang menjadi lokasi pengambilan sampel dan membagikannya kepada responden. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2012. Kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 80 eksemplar. Adapun rincian pendistribusian kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Distribusi kuesioner	80	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Kuesioner yang kembali	80	100%
4	Kuesioner yang cacat	0	0%
5	Kuesioner yang dapat diolah	80	100%
<b>n sampel = 80</b>			
<b>Responden Rate = (80/80) x 100% = 100%</b>			

Sumber : Data Primer, diolah 2012.

## 5.2 Uji Kualitas Data

### 5.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari kuesioner diperoleh. Dalam penelitian ini, uji validitas diukur menggunakan *Person Product Moment* dengan alat analisis berupa *Statistical Product and Service Solution 18* (PSAW 18).

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor variable jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 dan 0,01. Tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa nilai korelasi semua variabel signifikan pada nilai kritis 0,01. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid.

### 5.2.2 Uji Reabilitas Data

Uji reabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel. Pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel penelitian adalah 0,713, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga variabel penelitian tersebut dapat dinyatakan reliabel.

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian**

		<b>Correlations</b>					
		Ling-kungan	Resiko	Kegiatan	Infokom	Peman-tauan	Kinerja
Lingkungan	Pearson Corr	1	,990**	,315**	,998**	,454**	,786**
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Resiko	Pearson Corr	,990**	1	,326**	,985**	,466**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000		,003	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Kegiatan	Pearson Corr	,315**	,326**	1	,313**	,466**	,430**
	Sig. (2-tailed)	,004	,003		,005	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Infokom	Pearson Corr	,998**	,985**	,313**	1	,458**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,005		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80
Pemantauan	Pearson Corr	,454**	,466**	,466**	,458**	1	,406**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80
Kinerja	Pearson Corr	,786**	,778**	,430**	,782**	,406**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Sumber: Data primer diolah tahun 2012

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,713	6

Sumber : Data primer diolah tahun 2012

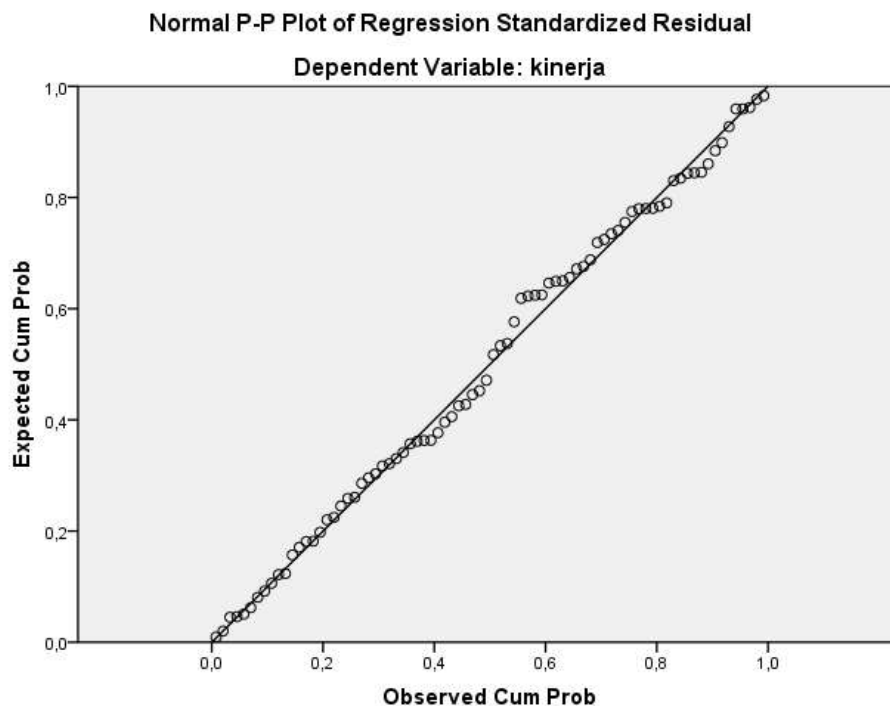
### 5.3 Uji Asumsi Klasik

#### 5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat normal *probability plot*.

**Gambar 5.1**

#### **Uji Normalitas (*p*-plot)**



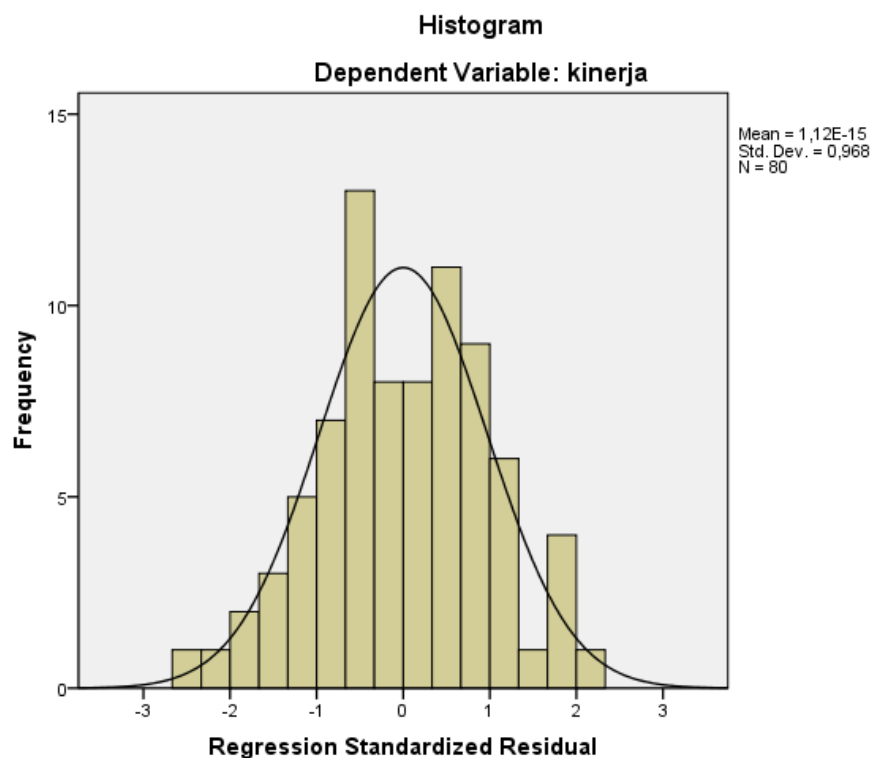
Sumber: Data primer diolah tahun 2012

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dilihat berdasarkan gambar 5.1 yang memperlihatkan grafik *p-plot*, maka semua data penelitian ini terdistribusi normal. Hal ini karena semua mengikuti garis normalitas ditunjukkan dengan titik-titik yang tidak jauh dari garis diagonal.

Pada penelitian ini, selain menggunakan grafik *p-plot* untuk uji normalitas data, juga dilakukan pengujian dengan menggunakan grafik histogram (gambar 5.2). Data dikatakan terdistribusi normal apabila bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang pada sisi kanan dan sisi kiri.

**Gambar 5.2**

**Grafik Histogram**



Sumber: Data primer diolah tahun 2012

### 5.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah kolinearitas dengan derajatnya satu hubungan linear.

Cara mengukurnya dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang disajikan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* di atas 10.

**Tabel 5.4**

#### **Variance Inflation Factor (VIF)**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Lingkungan Pengendalian	,548	1,826
Penilaian Resiko	,478	2,092
Kegiatan Pengendalian	,822	1,307
Informasi dan Komunikasi	,333	3,006
Pemantauan Pengendalian	,660	4,926

Sumber: Data primer diolah 2012

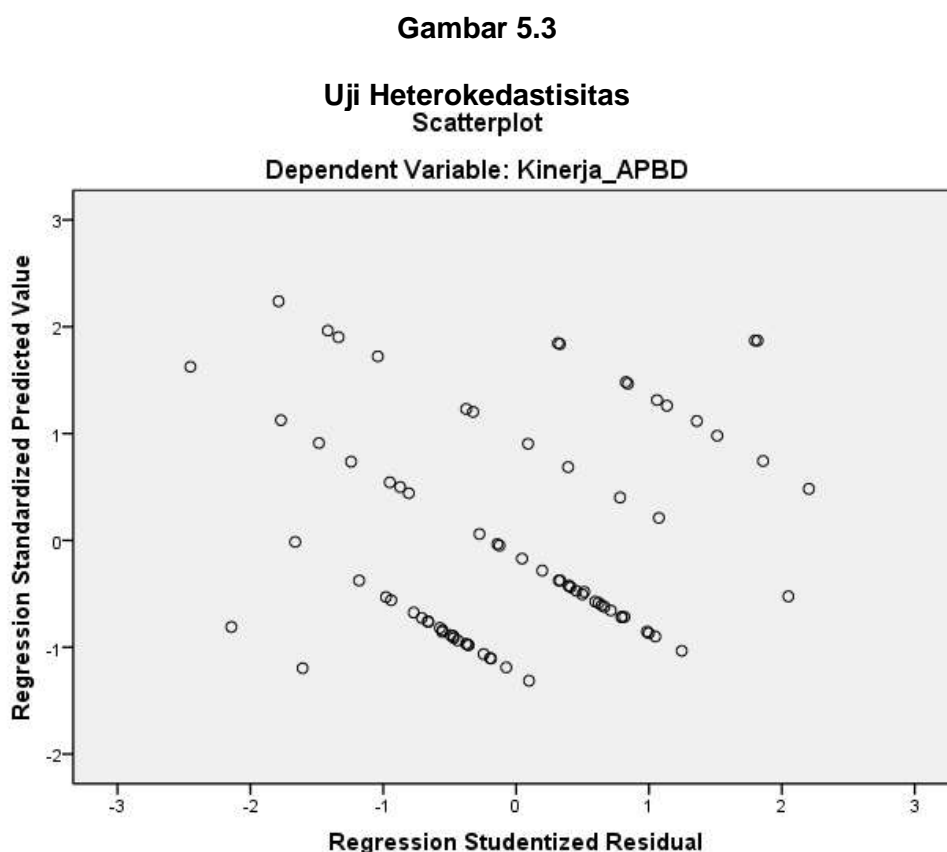
Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil *tolerance value* mendekati 1 atau di atas 0,1. Hal ini berarti bahwa antarvariabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Dengan kata lain, pada model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### 5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi dalam regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heterokedastisitas. Diagnosis adanya heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Bila grafik penyebaran nilai-nilai prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu, seperti meningkat atau menurun, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dari Gambar 5.3 terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y. Oleh karena itu, data pada penelitian ini bebas dari asumsi heteroedastisitas.





Sumber: Data primer diolah 2012

#### 5.4 Analisis Regresi Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan interpretasi model regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) penilaian resiko ( $X_2$ ), kegiatan pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan komunikasi ( $X_4$ ), dan pemantauan pengendalian ( $X_5$ ) terhadap variabel dependen kinerja APBD ( $Y$ ). Berikut adalah uraian hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan bantuan program PSAW versi 18 dalam bentuk output *model summary* sebagai berikut:

**TABEL 5.5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	5,850	1,021
	Lingkungan_Pengendalian	,138	,139
	Penilaian_Resiko	,088	,263
	Kegiatan_Pengendalian	,006	,002
	Informasi_dan_Komunikasi	,089	,273
	Pemantauan_Pengendalian	,005	,023

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,809 <sup>a</sup>	,655	,632	,679	2,033

Sumber data diolah tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.5 tampilan output *model summary*, besarnya *adjusted R square* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,632. Nilai ini menunjukkan bahwa 63,2% variabel kinerja APBD dapat dijelaskan oleh lima variabel independen yaitu: variabel lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) penilaian resiko ( $X_2$ ), kegiatan pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan komunikasi ( $X_4$ ), dan pemantauan pengendalian ( $X_5$ ), sedangkan sisanya 36,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup kuat untuk digunakan sebagai model prediksi yang baik.

Kemudian dari tabel 5.5, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,850 + 0,138X_1 + 0,088X_2 + 0,006X_3 + 0,089X_4 + 0,005X_5$$

Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,850 memberikan arti bahwa apabila nilai prediktor ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ) diasumsikan = 0, maka Kinerja APBD (Y) secara konstan bernilai 5,580.
2. Koefisien regresi ( $\beta$ )  $X_1$  sebesar 0,138 memberikan arti bahwa Lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan Lingkungan pengendalian maka akan terjadi kenaikan Kinerja APBD sebesar 0,138, dan begitupun sebaliknya.
3. Koefisien regresi ( $\beta$ )  $X_2$  sebesar 0,088 memberikan arti bahwa Penilaian resiko ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan Penilaian resiko maka akan terjadi kenaikan Kinerja APBD sebesar 0,088, dan begitupun sebaliknya.
4. Koefisien regresi ( $\beta$ )  $X_3$  sebesar 0,006 memberikan arti bahwa Kegiatan Pengendalian ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan Kegiatan Pengendalian maka akan terjadi kenaikan Kinerja APBD sebesar 0,006, dan begitupun sebaliknya.

5. Koefisien regresi ( $\beta$ ) X4 sebesar 0,089 memberikan arti bahwa Informasi dan komunikasi (X4) berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan Informasi dan komunikasi maka akan terjadi kenaikan Kinerja APBD sebesar 0,242, dan begitupun sebaliknya.
6. Koefisien regresi ( $\beta$ ) X5 sebesar 0,089 memberikan arti bahwa Pemantauan pengendalian (X4) berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan Informasi dan komunikasi maka akan terjadi kenaikan Kinerja APBD sebesar 0,242, dan begitupun sebaliknya.

## 5.5 Uji Hipotesis

### 5.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel Struktur Organisasi( $X_1$ ) Sistem Wewenang dan Prosedur Pembukuan( $X_2$ ), Praktek yang Sehat ( $X_3$ ), hubungan dengan sesama profesi ( $X_4$ ) secara simultan (bersama-sama).

Kriteria yang digunakan adalah :

Ho:  $\beta = 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian, tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja APBD.

Ha :  $\beta \neq 0$ , lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian, berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja APBD.

**TABEL 5.6**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64,682	5	12,936	28,100	,000 <sup>a</sup>
	Residual	34,068	74	,460		
	Total	98,750	79			

a. Predictors: (Constant), Pemantauan\_Pengendalian, Lingkungan\_Pengendalian, Kegiatan\_Pengendalian, Penilaian\_Resiko, Informasi\_dan\_Komunikasi

b. Dependent Variable: Kinerja\_APBD

Sumber: Data primer diolah tahun 2012

Hasil pengujian model keseluruhan diperoleh nilai F sebesar 28,100 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,01, maka model regresi dapat digunakan. Pada taraf  $\alpha = 0,01$  dengan derajat kebebasan pembilang/df1 ( $k$ ) = 4 dan derajat kebebasan penyebut/df2 ( $n-k-1$ ) = 74, diperoleh nilai F tabel 2,494. Maka, nilai F hitung 28,100 lebih besar dari nilai Ftabel (2,494). Dengan demikian  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima, artinya bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian, berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja APBD.

### 5.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah pengaruh itu positif dan signifikan atau tidak, dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikansi 5% dan  $dk = N-1$ . Hasil uji t

terhadap variabel penelitian dengan menggunakan program PSAW 18 adalah sebagai berikut :

**TABEL 5.7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji  $t$ )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,850	1,021		5,731	,000
Lingkungan Pengendalian	,138	,139	1,228	,995	,002
Penilaian Resiko	,088	,263	,171	,337	,004
Kegiatan Pengendalian	,006	,002	,211	2,699	,000
Informasi dan Komunikasi	,089	,273	,332	,328	,001
Pemantauan Pengendalian	,005	,023	,018	,214	,001

Sumber : Data primer diolah tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

**a. Tes Hipotesis Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kinerja APBD**

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t$  sebesar 0,995 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD. Sedangkan, berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Lingkungan Pengendalian adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Lingkungan Pengendalian dapat berakibat pada peningkatan Kinerja APBD. Dengan

demikian dapat disimpulkan **H1 diterima**. Artinya, Lingkungan Pengendalian yang lebih besar secara signifikan dapat meningkatkan Kinerja APBD.

**b. Tes Hipotesis Penilaian Resiko terhadap Kinerja APBD**

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t$  sebesar 0,337 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Penilaian Resiko berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja APBD. Sedangkan, berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Penilaian Resiko adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Penilaian Resiko dapat berakibat pada peningkatan Kinerja APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan **H2 diterima**.

**c. Tes Hipotesis Kegiatan Pengendalian terhadap Kinerja APBD**

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t$  sebesar 2,699 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Kegiatan Pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja APBD. Sedangkan, berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Kegiatan Pengendalian adalah positif. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kegiatan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD, dan pengaruh tersebut signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan **H3 diterima**.

**d. Tes Hipotesis Informasi dan Komunikasi terhadap Kinerja APBD**

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t$  sebesar 0,328 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD. Sedangkan, berdasarkan persamaan

regresi terlihat bahwa koefisien variabel Informasi dan Komunikasi adalah positif. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan **H4 diterima**.

**e. Tes Hipotesis Pemantauan Pengendalian terhadap Kinerja APBD**

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai  $t$  sebesar 0,214 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti variabel Pemantauan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD. Sedangkan, berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Pemantauan Pengendalian adalah positif. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pemantauan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan **H5 diterima**.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh unsur-unsur pengendalian internal terhadap kinerja keuangan dalam hal ini penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD Kabupaten Buton Utara artinya, lingkungan pengendalian yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas, mampu meningkatkan persepsi positif responden pada masing – masing instansi.
2. Pelaksanaan penilaian resiko yang meliputi kegiatan identifikasi dan analisis resiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi sangat signifikan pengaruhnya terhadap kinerja anggaran pada instansi masing-masing.
3. Kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan haruslah dijalankan sebaik-baiknya, didasarkan pada hasil penelitian dimana kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap Kinerja APBD, dan pengaruh tersebut signifikan.

4. Informasi dan komunikasi penting bagi pengendalian yang efektif, informasi tentang rencana organisasi, lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah dan seluruh organisasi. Informasi dan komunikasi harus senantiasa diupayakan agar terlaksana maksimal mengingat akan pengaruhnya yang signifikan terhadap Kinerja APBD.
5. Pemantauan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD, sehingga wajib untuk melakukan pemantauan pengendalian internal berkelanjutan berada pada setiap orang dalam instansi pemerintah sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab kerjanya.
6. Dari pengolahan data menggunakan regresi linear berganda membuktikan bahwa secara simultan variabel-variabel lingkungan pengendalian (X1), penilaian resiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), serta pemantauan pengendalian (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dalam hal ini penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Y).

## **6.2 Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pengendalian internal sangat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan namun terdapat beberapa kelemahan jika tidak dibarengi dengan pengawasan berkelanjutan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sulawesi Tenggara, selain itu sehubungan dengan daerah penelitian yang

merupakan daerah baru sehingga ini baru pertama kalinya terdapat jenis penelitian seperti ini sehingga responden belum terbiasa dengan hal ini, namun sangat dibanggakan karena daerah ini dapat dengan baik mampu bekerja sama dengan peneliti.

2. Keterbatasan - keterbatasan yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat menjadi ajang perbaikan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang. Penelitian mendatang sebaiknya menambah periode waktu objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang perkembangan kinerja Pemerintah Daerah setempat.

### **6.3 Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

1. Sampel penelitian ini terbatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang merupakan daerah pemekaran baru di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Januari 2007 merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili seluruh daerah di Indonesia. Kemungkinan adanya perbedaan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan dapat saja terjadi apabila penelitian dilakukan pada objek penelitian yang berbeda.
2. Pengukuran seluruh variabel mengandalkan pengukuran subyektif atau berdasarkan pada persepsi responden saja. Pengukuran subyektif rentan terhadap munculnya bias atau kesalahan pengukuran

3. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data, sehingga masih ada kemungkinan terdapat kelemahan-kelemahan data yang dijumpai, seperti jawaban yang kurang cermat, ataupun responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S. *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah? Atau, Mengapa?* (online) (<http://syukriy.wordpress.com/2008/10/19/sistem-pengendalian-internal-pemerintah-perluah-atau-mengapa/>), diakses 18 januari 2012.
- Abdullah S. *Daya Serap Anggaran Rendah Masalah Desentralisasi Fiskal.* (online) (<http://syukriy.wordpress.com/2009/01/21/daya-serap-anggaran-rendah-masalah-desentralisasi-fiskal-daerah/>), diakses 18 januari 2012.
- Elim J, Safral M. 2009. *Lingkungan Pengendalian*. Jakarta : Pusdiklatwas BPKP.
- Haryanto, Arifuddin, Sahmuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasmah R. *Menyongsong penerapan SPIP : Menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik.* (online) (<http://www.bappenas.go.id/blog/?p=29>), diakses 18 januari 2012.
- Kabupaten Buton Utara Dalam Angka 2009*. 2009. Muna : Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna.
- Kansil CST, Kansil Christine S.T. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010*. 2010. Buranga : Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
- Mamesah, DJ. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta : Penerbit CV. Tamita Utama.
- Siagian SP. 1985. *Proses Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soeseno K. 2009. *Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Soetjipto K, Seno. 1987. *Akuntansi Anggaran Suatu Pengantar*. Jakarta : Liberty
- Suparmoko M. 2002 *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Yuwono S, Utomo DC, Zein S, R Azrafiani A. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang : Bayumedia Pulishing.

Widayadi D. 2008. *Abstraksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah & Peran BPKP*. Makassar : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

**Lampiran 1 : Biodata****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Rosita Tasir  
Tempat, Tanggal Lahir : Baubau, 18 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jl Perintis Kemerdekaan, Rusunnawa Unhas  
Telpon Rumah dan HP : 085241783015  
Alamat E-mail : siji\_fek@yahoo.com

**Riwayat Pendidikan**

- Pendidikan Formal
  - SD
  - SLTA
  - SMA
  - Universitas
- Pendidikan Nonformal
  - Kursus Komputer
  - Kursus Bahasa Inggris

**Riwayat Prestasi**

- Prestasi Akademik
  - Mengikuti tes TOEFL di kelas bahasa Unhas dengan score 500 tahun 2007
- Prestasi non-akademik
  - Juara 1 lomba MTQ Se-provinsi Sulawesi Tenggara 1999-2004
  - Juara 1 lomba menyanyi
  - Anggota *marching band*

**Pengalaman**

- Organisasi
  - Paduan Suara Mahasiswa Unhas 2010
- Kerja
  - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BTP Tamalanrea

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Januari 2013

Rosita



## Lampiran 2 : Kuesioner

### KUISIONER PENELITIAN PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

#### Identitas Responden

Nama :

Instansi :

**Isilah dengan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut anda paling sesuai dengan penilaian anda terhadap kondisi nyata Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2010.**

Sangat setuju : 5

Setuju : 4

Netral : 3

Tidak setuju : 2

Sangat tidak setuju : 1

#### I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

	5	4	3	2	1
a. Penegakan integritas dan nilai etika					
Telah tersusun, tersosialisasi, dan diterapkannya aturan perilaku yang komprehensif					
Setiap tingkatan pimpinan telah memberikan keteladanan penerapan aturan dalam tutur kata maupun tindakan nyata					
Telah terlaksanakannya penegakan disiplin dan penerapan aturan etika secara konsisten					
b. Komitmen terhadap kompetensi					
Pelaksanaan rekrutmen pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah					
Penempatan pegawai pada posisi tertentu berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan					
Tersusun dan terlaksananya program pendidikan					

dan pelatihan yang terstruktur dan sistematis					
Tersedia pedoman evaluasi untuk komitmen terhadap kompetensi					
Adanya proses evaluasi yang terstruktur dan berkesinambungan					
c. Kepemimpinan yang kondusif					
Pimpinan memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan					
Pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja					
Terdapat interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah					
Pimpinan memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap setiap pelaporan					
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan					
Struktur organisasi instansi disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan					
Pimpinan instansi pemerintah memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab					
Terdapat kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam instansi					
Pimpinan melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis					
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat					
Adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam instansi					
Penetapan wewenang dan tanggung jawab dikomunikasikan kepada semua pegawai					
Tanggung jawab pimpinan sesuai dengan kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya					
Terdapat prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan					
Pegawai diberdayakan untuk mengatasi masalah atau melakukan perbaikan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya					
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pemberdayaan SDM					
Pimpinan instansi mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai mengenai kompetensi pegawai					

baru yang diperlukan					
Instansi memiliki standar atau kriteria dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika					
Terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan berkesinambungan untuk semua pegawai					
Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja					
Dilakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen					
Dilakukan supervisi periodik yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai					
g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal yang efektif					
Terdapat APIP independen, yang melakukan pengawasan atas kegiatan instansi pemerintah					
Terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi					
Terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah					
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait					
Instansi memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan					
Instansi melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian internal, serta kinerja					
Pimpinan memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi					

## II. PENILAIAN RESIKO

	5	4	3	2	1
a. Penilaian resiko					
Pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan					
Tujuan instansi secara keseluruhan harus cukup					

spesifik, terukur, dapat dicapai, realitis, dan terikat waktu.					
Tujuan instansi dikomunikasikan pada semua pegawai sehingga pimpinan instansi pemerintah mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa komunikasi tersebut berjalan secara efektif.					
Pimpinan menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis dan rencana penilaian resiko					
<b>b. Analisis resiko</b>					
Pimpinan menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis resiko berdasarkan kegiatan sehari-hari					
Pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima					
Terdapat mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap resiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lainnya.					

### III. KEGIATAN PENGENDALIAN

	5	4	3	2	1
<b>a. Reviu atas kinerja pemerintah</b>					
Pimpinan terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan					
Pimpinan terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil reviu					
Pimpinan secara berkala mereviu kinerja dibandingkan dengan rencana					
Telah dilakukan reviu pada tingkat kegiatan dibandingkan dengan tolak ukur kinerja					
<b>b. Pembinaan sumber daya manusia</b>					
Visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi telah dipahami dan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai					
Instansi memiliki strategi pembinaan SDM yang spesifik					
Instansi pemerintah telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan					

Pimpinan membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi instansi pemerintah, dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai					
Sistem manajemen kinerja pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan instansi					
Instansi telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan					
Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang berubah-ubah					
Terdapat sistem kompensasi yang cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan pegawai serta intensif dan penghargaan disediakan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal					
Instansi memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai					
Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai					
Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif					
Pimpinan instansi melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan					
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi					
Instansi melaksanakan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif					
Pimpinan mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya					
Pimpinan menetapkan organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan					
Instansi memantau efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan					
Instansi mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya					

Pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan memiliki otorisasi akses ke informasi secara formal					
Instansi menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi					
Instansi memantau akses ke sistem informasi, melakukan investigasi atas pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin					
Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui					
Instansi telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak					
Instansi membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan					
Dilakukan pengendalian serta pemantauan terhadap akses dan penggunaan perangkat lunak					
Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan tugas					
Instansi melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reuiu					
d. Pengendalian fisik atas aset					
Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik aset telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai					
Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi dan mengamankan aset infrastruktur					
Aset yang beresiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak, secara fisik telah diamankan dan akses terhadap aset tersebut dikendalikan					
Aset secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian					
Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan, dijaga dalam tempat terkunci, dan akses ke aset tersebut secara ketat dikendalikan					
Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat					
Identitas aset dilekatkan pada mebel, peralatan, dan inventaris kantor lainnya					
Persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang aman secara fisik dan dilindungi dari kerusakan					

Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan alarm kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran					
Akses ke fasilitas di luar jam kerja dibatasi dan dikendalikan					
Pimpinan menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana kepada seluruh pegawai.					
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja					
Ukuran dan indikator kinerja telah ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan, dan pegawai					
Instansi mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja					
Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut					
f. Pemisahan fungsi					
Tidak seorangpun diperoleh mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian					
Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset					
Tugas dilimpahkan secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan adanya <i>checks and balances</i>					
Tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset beresiko tinggi lainnya					
Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas					
Pimpinan instansi mengurangi kemungkinan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi					
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting					
Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan instansi					

Transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai dengan lingkup otoritasnya					
Otorisasi secara spesifik memuat kondisi dan syarat otorisasi dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan pegawai instansi					
Terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan instansi					
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian					
Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai dan berguna					
Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar					
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya					
Resiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya dilakukan oleh pegawai yang berwenang					
Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara					
Pimpinan instansi mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat					
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya					
Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan kepada pegawai khusus					
Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara					
Perbandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya, dan jika tidak sesuai, dilakukan audit					



Pimpinan menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami tanggungjawabnya					
k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal, serta transaksi dan kejadian yang penting					
Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup sistem pengendalian internal pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting					
Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa					
Dokumentasi atas sistem pengendalian internal mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi pemerintah pada tingkatan kegiatan					
Dokumentasi atas sistem pengendalian internal mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi					
Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian yang lengkap dan akurat mulai dari otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian					
Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik, serta dimutakhirkan secara berkala					

#### IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

	5	4	3	2	1
a. Informasi					
Informasi dari sumber internal dan eksternal yang diperoleh senantiasa disampaikan kepada pimpinan sebagai bagian dari pelaporan pencapaian kinerja					
Pimpinan menerima informasi hasil analisis yang dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan					
Informasi sudah disiapkan dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan pimpinan					
Informasi yang relevan diringkas dan disajikan secara memadai sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengecekan secara rinci					

Informasi disediakan tepat waktu agar dapat dilaksanakan pemantauan sehingga memungkinkan dilakukan tindakan korektif secara tepat					
Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap suatu program senantiasa menerima informasi operasional dan keuangan untuk membantu mengukur kinerja					
Telah tersedia informasi keuangan dan anggaran yang memadai guna mendukung penyusunan pelaporan keuangan internal dan eksternal					
<b>b. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif</b>					
Pimpinan instansi sudah menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang tepat dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan pihak lainnya					
Pimpinan senantiasa melakukan komunikasi positif dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai diseluruh tingkatan organisasi instansi					
Telah tersedia manajemen sistem informasi yang dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis internal					
Terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi					
Telah dilakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pemanfaatan perkembangan dan kejauan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien					
Pimpinan secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya					
Pimpinan menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan teknologi informasi					

## V. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL

	5	4	3	2	1
<b>a. Pemantauan berkelanjutan</b>					
Pimpinan memiliki strategi pemantauan berkelanjutan yang efektif yang dapat memicu evaluasi terpisah saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta saat pengujian secara berkala diperlukan.					

Laporan operasional sudah terintegrasi dengan data laporan keuangan dan anggaran					
Pegawai operasional menjamin keakuratan laporan keuangan dan bertanggungjawab jika ditemukan kesalahan					
Dilakukan komunikasi dengan pihak eksternal untuk menguatkan data yang dihasilkan internal.					
Terdapat struktur organisasi dan supervisi yang memadai					
Data yang tercatat secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya					
Melakukan rapat dengan pegawai secara berkala untuk meminta masukan tentang efektifitas pengendalian internal					
b. Evaluasi terpisah					
Telah dilakukan evaluasi terpisah secara berkala					
Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah atau auditor eksternal					
Metodologi evaluasi mencakup <i>self assesment</i> , dengan menggunakan daftar periksa, kuesioner, atau perangkat lainnya.					
Evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan.					
Telah tersusun suatu rencana evaluasi terpisah untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi					
Jika dalam evaluasi terpisah ditemukan adanya kelemahan, maka akan segera diselesaikan					

**VI. KINERJA APBD**

		5	4	3	2	1
1.	Seluruh program/kegiatan instansi terealisasi sesuai perencanaan.					
2.	Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.					
3.	Program/kegiatan yang telah direncanakan terlaksana tepat waktu.					
4.	Proses manajemen kegiatan dan evaluasi berjalan dengan baik					
5.	Dana yang dianggarkan terserap maksimal					

**Lampiran 3 : Surat Selesai Melakukan Penelitian**

#### Lampiran 4 : Master Tabel

No	Asal Instansi	Lingkungan	Resiko	Kegiatan	Infokom	Pemantauan	kinerja apbd
1	Dinas pendidikan	130	28	250	55	48	19
2	UPTD Kulisusu	108	23	209	46	42	16
3	UPTD Kulisusu Utara	107	23	207	45	39	16
4	UPTD Kulisusu Barat	103	22	208	44	40	15
5	UPTD Bonegunu	102	22	210	43	41	15
6	UPTD Kambowa	132	28	199	56	47	17
7	UPTD Wakorumba Utara	115	24	165	49	49	16
8	SMP 1 Kulisusu	119	25	182	50	39	16
9	SMP 2 Kulisusu	128	27	173	54	40	18
10	SMP 3 Kulisusu	115	24	159	49	39	16
11	SMP 4 Kulisusu	103	22	189	44	41	15
12	SMP 5 Kulisusu	103	22	178	44	42	15
13	SMP 6 Kulisusu	126	27	153	53	40	16
14	SMP 7 Kulisusu	119	25	175	50	41	18
15	SMP 8 Kulisusu	132	28	182	56	43	16
16	SMP Satu Atap 38 Kulisusu	103	22	188	44	39	15
17	SMP Satu Atap 39 Kulisusu	102	22	168	43	42	15
18	SMP 1 Bonegunu	104	22	191	44	42	15
19	SMP 2 Bonegunu	130	28	154	55	41	17
20	SMP 3 Bonegunu	126	27	198	53	45	17
21	SMP 4 Bonegunu	119	25	173	50	46	16
22	SMP 5 Bonegunu	109	23	185	46	39	15
23	SMP Satu Atap 6 Bonegunu	107	23	181	45	41	16
24	SMP 1 Wakorumba Utara	106	22	176	45	42	16
25	SMP 4 Wakorumba Utara	104	22	178	44	39	15
26	SMP 35 Satu Atap Torombia KU	106	22	201	45	40	15
27	SMP 33 Satu Atap Margakarya KB	108	23	189	46	40	16
28	SMP 34 Satu Atap Soloy KB	109	23	173	46	41	16
29	SMP 2 Satu Atap Kulisusu	119	25	203	50	40	17
30	SMP 2 Satu Atap Bonegunu	105	22	192	45	42	15
31	SMP 3 Satu Atap Bonegunu	105	22	176	45	39	16
32	SMP Satu Atap Kambowa	105	22	175	45	40	16
33	SMA 1 Kulisusu	108	23	165	46	40	15

34	SMAN 2 Kulisusu	106	22	148	45	39	16
35	SMAN 1 Kulisusu Utara	106	22	190	45	40	16
36	SMKN 1 Kulisusu Utara	105	22	189	45	39	15
37	SMA 1 Kambowa	109	23	176	46	39	16
38	SMK 1 Kambowa	103	22	190	44	40	15
39	SMA 1 Bonegunu	111	24	164	47	41	16
40	SMA 2 Bonegunu	100	21	181	42	40	14
41	SMA 1 Wakorumba Utara	102	22	178	43	39	15
42	SKB	103	22	187	44	48	16
43	Dinas Kesehatan	102	22	276	43	52	16
44	Puskesmas Kulisusu	118	25	270	50	45	18
45	Puskesmas Wao De Buri	125	27	260	53	46	18
46	Puskesmas Lambale	119	25	267	50	44	18
47	Puskesmas Bonegunu	128	27	262	54	48	18
48	Puskesmas Kambowa	116	25	269	49	49	18
49	Puskesmas Wakorumba Utara	129	27	176	55	44	18
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	110	23	192	47	41	16
51	Badan Perencana Pembangunan, Statistik dan Penanaman Modal	112	24	164	48	42	16
52	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	112	24	247	48	42	17
53	Badan Lingkungan Hidup	113	24	192	48	40	15
54	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	130	28	193	55	48	18
55	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	126	27	191	53	50	16
56	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian	125	27	183	53	52	17
57	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	113	24	177	48	49	16
58	Badan KESBANG LINMAS	107	23	189	45	40	15
59	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	106	22	153	45	48	15
60	DPRD	131	28	250	56	52	17
61	Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	132	28	275	56	51	17
62	Sekretariat Daerah	129	27	271	55	48	17
63	Sekretariat DPR	132	28	220	56	47	19
64	Inspektorat	115	24	276	49	49	16

65	Kec. Kulisusu	103	22	142	44	41	15
66	Kec. Kulisusu Utara	105	22	142	45	41	15
67	Kec. Kulisusu Barat	109	23	139	46	42	16
68	Kec. Bonegunu	111	24	143	47	43	16
69	Kec. Kambowa	110	23	140	47	42	16
70	Kec. Wakorumba Utara	110	23	151	47	41	16
71	Dinas PPKAS	108	23	167	46	50	16
72	PPKD	105	22	195	45	40	15
73	BKD	101	21	231	43	44	14
74	Badan Ketahanan Pangan	120	25	159	51	45	17
75	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	106	22	162	45	49	15
76	Dinas Pertanian	117	25	164	50	48	16
77	Dinas Kehutanan	116	25	233	49	47	16
78	Dinas Pertambangan	129	27	254	55	49	18
79	Dinas Kelautan dan Perikanan	102	22	210	43	50	15
80	Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	106	22	205	45	44	17



Lampiran 5 : Peta Administrasi Kabupaten Buton Utara

